BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) ataupun Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, pun tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi Aktualisasi dari berbagai segmen perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggung jawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.

A. PENGUKURAN KINERJA

Laporan Kinerja (LKj) harus menyajikan data dan informasi relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Oleh karena itu perlu dibuat suatu analisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerja instansi secara keseluruhan.

Untuk menilai sejauh mana keberhasilan dan ketidakberhasilan pencapaian sasaran maka digunakan skala ordinal sebagai berikut :

Nilai Capaian (dalam %)	Hasil Capaian
> 61	Sangat Berhasil
31 < X ≥ 60	Berhasil
11 < X ≤ 30	cukup berhasil
< 10	tidak berhasil

Prosentase nilai capaian diperoleh dari hasil bagi antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan, dimana selanjutnya nilai capaian tersebut telah dilakukan pengkelasan sehingga dapat diambil kesimpulan pencapaian suatu sasaran.

B. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017

Secara umum Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019. Pencapaian kinerja tahun anggaran 2017 sudah mengacu dan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2017 dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 80 Tahun 2016. Capaian Indikator dan Target Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2017 akan disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel. 3.1.
Capaian Kinerja Tahun 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2016 (%)	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian 2017 (%)	Kategori	Target Akhir Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Perumahan dan Permukiman serta Prasarana Sarana utilitas Umum (PSU)	Persentase Rumah Tidak Layak Huni	-	9,73	1,29	13,25	Cukup Berhasil	9,73
	Persentase Kawasan Kumuh	-	45,05	15,76	34,98	Berhasil	45,05
	Persentase Ketersediaan Tempat Hunian	-	100	50	50,00	Berhasil	100

C. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017

Pengukuran capaian pelaksanaan pembangunan yang berupa Indikator Sasaran pembangunan terhadap target hasil pembangunan dalam berapa tahun ditunjukkan dengan besaran angka-angka yang bilamana digambarkan dengan grafik akan dapat dilihat pola atau trend, apakah meningkat, menurun, ataukah konstan, atau dalam bahasa lain adalah sebagai keberhasilan, kemajuan, stagnan, kemunduran, atau bahkan kegagalan kinerja Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan.

Namun pengukuran itu saja tidak cukup tanpa tahu apa makna atau deskripsi dari semua kondisi itu, kondisi-kondisi tersebut perlu dianalisis dari pengukuran capaian pelaksanaan pembangunan agar dapat diketahui hubungan permasalahannya untuk diidentifikasi sebagai sebab akibat berupa faktor-faktor yang mempengaruhinya, mana yang menjadi hambatan dan kendala untuk dijadikan *feed back* bagi perencanaan dan pelaksanaan kinerja pada putaran atau periode waktu tahun berikutnya.

Keberhasilan atau kegagalan dari suatu sasaran bisa saja terjadi dalam proses waktu yang tidak singkat, lebih dapat dipastikan lagi faktor yang mempengaruhinya tidak dapat terjawab dalam waktu pengukuran akuntabilitas kinerja satu tahun. Evaluasi bisa berupa perbandingan antar target, atau antar capaian dalam rentang sekian tahun, ataupun antara capaian dengan target sampai dengan tahun 2017. Hasil evaluasi tujuan dan indikator tujuan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2017 disajikan sebagai berikut :

Tabel. 3.2.

Capaian Tujuan Tahun 2017

Tujuan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kualitas Sarana Dasar Permukiman	Persentase Rumah Tangga yang terlayani infrastruktur dasar	62,08	32,74	52,73 %

D. REALISASI ANGGARAN

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan seluruh program kerja didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2017, tujuan dan sasaran pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman didukung dengan berbagai program sebagai berikut:

Tabel. 3.3.
Realisasi Anggaran Tahun 2017

No.	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %
1	**PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH**	**847.874.000**	**795.705.550**	**93,85**
	Pengelolaan RUSUNAWA	847.874.400	795.705.550	93,85
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	**506.576.000**	**429.821.856**	**84,85**
	Penyediaan jasa surat menyurat	25.000.000	23.400.000	93,60
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	120.600.000	66.946.493	55,51
	Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang daerah	107.944.000	90.426.000	83,77
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	20.400.000	20.400.000	100
	Penyediaan alat tulis kantor	38.229.000	38.229.000	100
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	24.558.000	24.456.020	99,58
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	20.000.000	19.759.200	98,80
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangn-undangan	1.620.000	1.620.000	100
	Penyediaan bahan logistik kantor	9.675.000	9.225.000	95,35
	Penyediaan makanan dan minuman	20.100.000	18.921.000	94,13
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	108.625.000	108.614.143	99,90
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	9.825.000	7.825.000	79,64
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	**242.158.000**	**238.431.102**	**98,46**
	Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor	19.250.000	19.175.000	99,61
	Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor	137.740.000	136.996.000	99,46

No.	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	37.368.000	36.979.000	98,96
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	32.100.000	31.851.102	99,22
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor	1.800.000	0,00	0,00
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan kantor	13.900.000	13.430.000	96,62
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	**6.175.000**	**3.607.000**	**58,41**
	Pengiriman aparatur dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	6.175.000	3.607.000	58,41
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	**4.000.000**	**3.920.950**	**98,02**
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD / LAKIP	2.000.000	1.957.500	97,88
	Penyusunan laporan evaluasi hasil pembangunan	2.000.000	1.963.450	98,17
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	**97.500.000**	**93.554.880**	**95,95**
	Identifikasi dan fasilitasi perijinan kawasan perumahan	97.500.000	93.554.880	95,95
	PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN	**1.421.075.000**	**1.329.571.597**	**93,56**
	Fasilitasi rehabilitasi rumah tidak layak huni	646.450.000	576.439.300	89,17
	Pembangunan insfrastruktur kawasan permukiman padat dan kumuh	431.825.000	416.352.500	96,42
	Inventarisasi data prasarana dan sarana utilitas	166.800.000	164.043.550	98,35
	Peningkatan kualitas perumahan swadaya	176.000.000	172.736.247	98,15
	PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN	**113.082.500**	**98.579.088**	**87,17**
	Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman berbasis masyarakat di perkotaan	113.082.500	98.579.088	87,17
	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	**20.000.000**	**19.590.000**	**97,95**
	Penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) SKPD	20.000.000	19.590.000	97,95